

KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SORONG

Susi Susanti Kambu, Debby Ch. Rotinsulu, Steva Y.L. Tumangkeng

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan,
Universitas Sam Ratulangi, Manado
Email : susikambu@yahoo.com*

ABSTRAK

Krisis moneter yang pernah dialami negara Indonesia pada tahun 1998 mengakibatkan menurunnya penerimaan negara dan terhambatnya pembangunan dalam berbagai sektor. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara salah satunya hanya melalui pajak dan retribusi daerah. Disisi lain, otonomi menuntut kemandirian daerah diberbagai bidang, termasuk kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan didaerahnya. Kabupaten Sorong, dilihat dari kemandirian pendanaan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat atau propinsi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemandirian daerah perlu dilihat sejauh mana kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dikabupaten Sorong. Objek penelitian ini adalah Kabupaten Sorong khususnya Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan Mengidentifikasi bagaimana perkembangan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sorong. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007-2013. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Deskriptif Statistik dan Analisis Trend. Hasil Penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif statistik menunjukkan bahwa Pajak Daerah Kontribusinya semakin meningkat dan penerimaannya mengalami tren positif dengan slope curam yang menunjukkan penerimaan Pajak Daerah akan meningkat dengan cepat. Retribusi Daerah kontribusinya semakin menurun dan tren penerimaannya juga positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi peningkatan yang pesat.

Kata Kunci : Pajak , Retribusi, PAD, Kontribusi dan Trend

1. PENDAHULUAN

Krisis moneter yang pernah dialami negara Indonesia pada tahun 1998 mengakibatkan menurunnya penerimaan negara dan terhambatnya pembangunan dalam berbagai sektor. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara salah satunya hanya melalui pajak dan retribusi daerah. Syafrizal (1997:27-38) mengatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh propinsi (daerah) yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing daerah yang bervariasi maka sebaiknya masing-masing daerah harus menentukan kegiatan sektor dominan (unggulan).

Disisi lain, otonomi menuntut kemandirian daerah diberbagai bidang, termasuk kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan didaerahnya. Kabupaten Sorong, dilihat dari kemandirian pendanaan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat atau propinsi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemandirian daerah perlu dilihat sejauh mana kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dikabupaten Sorong.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembanguna daerah yang berdasarkan otonomi daerah tersebut dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 yang disahkanpada tanggal 15 Oktober 2004 tentang pemerintah daerah, dimana UU tersebut memeberikan wewenang otonomi pada aderah untuk mengelolah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan untuk mengatur pembagian keungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka dibentuklah Undang-Undang Otonomi Daerah N0.33 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004 tentang perimbangan keungan Antar Pusat dan Pemerintah Daerah agar supaya system pembagian keungannya adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pematuan.

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Sorong tahun 2007-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong
Tahun 2007-201**

Tahun	Pajak	Retribusi	PAD
2007	251.920.211	3.154.574.453	8.372.362.900
2008	261.278.400	3.705.685.930	10.258.859.262
2009	387.190.136	5.513.032.280	13.381.188.093
2010	359.836.889	5.623.823.770	16.200.176.123
2011	2.089.573.098	6.479.312.780	17.127.407.275
2012	2.400.679.129	6.397.266.321	18.456.130.263
2013	11.488.223.730	10.665.252.472	75.189.158.555

Sumber data: Dispenda Kabupaten Sorong Tahun 2007-2013

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 2007-2013 mengalami peningkatan dan terbesar pada tahun 2013 mencapai tujuh puluh lima miliaran rupiah. Untuk Pajak Daerah terjadi peningkatan dan peningkatan yang besar terjadi pada tahun 2011 dan yang terbesar pada tahun 2013 yaitu mencapai sebelas miliaran rupiah. Retribusi Daerah selang periode tahun 2007-2013 mengalami peningkatan dan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2013 telah mencapai sepuluh miliaran rupiah.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD pemerintah daerah sangat memperhatikan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan karena sumber penerimaan pendapatan asli daerah sebagian besar diterima dari kedua komponen ini. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah merupakan semakin besarnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai efek dari semakin baiknya tingkat kesejahteraan atau tingkat pendapatan masyarakat. Dengan demikian jika semakin besar partisipasinya masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin besar sehingga semakin besar pula penerimaan PAD yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat mandiri dan pada gilirannya akan semakin besar pula keleluasaan pemerintah daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangannya sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunannya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong?
2. Bagaimana potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sorong?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana peranan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sorong.

2. Mengidentifikasi bagaimana perkembangan potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sorong.

Dalam penelitian ini terdapat teori-teori yang mendukung. Antara lain:

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut prof. Meier (2005:205), pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Menurut Schumpeter (2000:5), pembanguana ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Prof. Simon Kuznets (2000:57), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya.

Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Menurut Aristanti Widyaningsih (2011:11-12) teori pemungutan pajak memberikan penjelasan mengenai hak negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antra lain

1. Teori Ansuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang, karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak harus dibayar harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan:

- ❖ Unsure Objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang.
- ❖ Unsure Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Menurut Aristanti Widyaningsih (2011:216-219), jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Teori Retribusi

Marihot Pahala Siahaan (2009:5-7) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah.

Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 golongan, menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 108 ayat 2-4 yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c. Retribusi pengantoran biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum
 - e. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - f. Retribusi pasar
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 - k. Retribusi pengolahan limbah cair
 - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang

- m. Retribusi pelayanan pendidikan
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi pasar grosir/pertokoan
 - c. Retribusi tempat pelelangan
 - d. Retribusi terminal
 - e. Retribusi tempat parkir khusus
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 - g. Retribusi rumah potong hewan
 - h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - j. Retribusi penyebrangan diatas air
 - k. Retribusi penjualan produk usaha daerah
 3. Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari:
 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - c. Retribusi izin gangguan
 - d. Retribusi izin trayek

Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Mceachern (2000:146), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Gross Domestic Product (GDP) artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. Gross domestic product hanya mencakup barang dan jasa akhir, yaitu barang dan jasa yang dijual kepada pengguna yang terakhir. Untuk barang dan jasa yang dibeli untuk diproses lagi dan dijual lagi (Barang dan jasa intermediate) tidak dimasukkan dalam GDP untuk menghindari masalah double counting atau penghitungan ganda, yaitu menghitung suatu produk lebih dari satu kali.

Ada dua tipe GDP , yaitu :

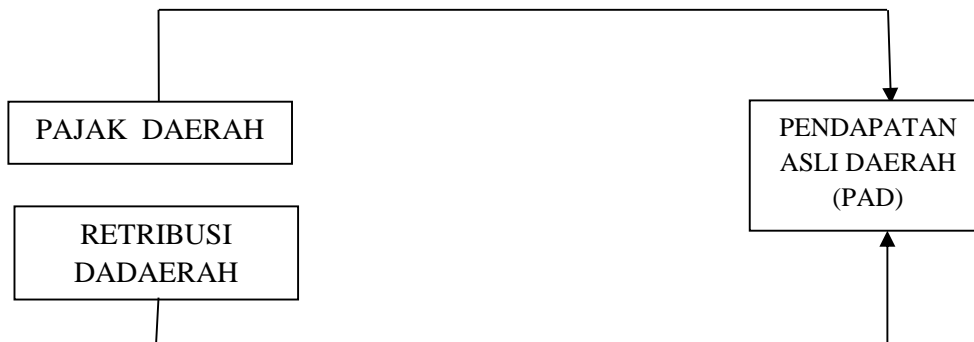
1. GDP dengan harga berlaku atau GDP nominal, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut.
2. GDP dengan harga tetap atau GDP riil, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada satu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lain angka-angka GDP merupakan hasil perkalian jumlah produksi(Q) dan harga (P), kalau harga-harga naik dari tahun ke tahun karena inflasi, maka besarnya GDP akan naik pula, tetapi belum tentu kenaikan tersebut menunjukkan jumlah produksi (GDP riil). Mungkin kenaikan GDP hanya disebabkan oleh kenaikan harga saja, sedangkan volume produksi tetap atau merosot.

Menurut Mceachern (2000:147) ada dua macam pendekatan yang digunakan dalam perhitungan GDP, yaitu:

1. Pendekatan pengeluaran, menjumlahkan seluruh pengeluaran agregat pada seluruh barangan dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun.
2. Pendekatan pendapatan, menjumlahkan seluruh pendapatan agregat yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut.

Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian



Kerangka konseptual penelitian yang digunakan untuk mengarahkan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 Pada gambar 1 menunjukkan :

- 1) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuannya dan ditetapkan oleh daerah, yang diukur dalam satuan rupiah per tahun akan berpengaruh terhadap perolehan PAD
- 2) Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atas pekerjaan, usaha milik daerah atau jasa yang diberikan oleh daerah, yang diukur dalam satuan rupiah per tahun akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD
- 3) Pendapatan Asli Daerah yaitu semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari penerimaan pajak, retribusi daerah, Laba Usaha Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Penerimaan rutin daerah yang berasal dari pungutan (pajak, retribusi) dan hasil dari perusahaan daerah lainnya serta hasil usaha daerah yang sah pada tahun 2007-2013. Perkembangan PAD sangat bergantung kepada penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data bersifat sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong. Disamping itu data-data yang relevan diperoleh dari berbagai sumber bacaan dan juga dari Internet.

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif Statistik

Dimana proses deskripsi data pada dasarnya meliputi upaya penelusuran dan pengungkapan informasi yang relevan yang terkandung dalam data dan hasilnya disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga pada akhirnya mengarah pada keperluan adanya penjelasan dan penafsiran. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sorong dari waktu ke waktu dalam suatu series data selama periode tahun 2007 hingga tahun 2013. Perhitungan kontribusinya adalah sebagai berikut:

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{p_i}{p} \frac{h}{h} \times 100\%$$

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{p_i}{p} \frac{h}{h} \times 100\%$$

Analisis Trend

Analisis trend dalam penelitian ini, digunakan untuk melihat apakah kecenderungan potensi dari pajak dan retribusi daerah dari waktu ke waktu dalam suatu series data selama periode tahun 2007 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan atau sebaliknya mengalami penurunan. Analisis trend ini juga digunakan untuk memproyeksikan atau meramalkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sorng pada masa yang akan datang, dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (*least square method*) dengan rumus :

$$Y = a + bx \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (2.1)$$

$$a = \frac{\sum y}{n} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (2.2)$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (2.3)$$

Keterangan :

y = Variabel yang akan dicari trendnya

a = Nilai Konstanta

b = Parameter

x = Variabel Waktu (tahun)

n = Jumlah Data

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikuto, 1998:33). Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuannya dan ditetapkan oleh daerah, yang diukur dalam satuan rupiah per tahun selama tahun 2007-2013.
2. Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atas pekerjaan, usaha milik daerah atau jasa yang diberikan oleh daerah, yang diukur dalam satuan rupiah per tahun selama tahun 2007-2013
3. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari penerimaan pajak, retribusi daerah, Laba Usaha Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan. Penerimaan rutin daerah yang berasal dari pungutan (pajak, retribusi) dan hasil dari perusahaan daerah lainya serta hasil usaha daerah yang sah pada tahun 2007-2013 yang diukur dalam satu rupiah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam era otonomi sekarang ini dapat dilihat, banyak daerah yang berlomba-lomba meningkatkan PAD. Hampir semua Kabupaten dan Kota berusaha memacu dengan menggali potensi daerahnya sendiri. Di antara jenis PAD Kabupaten Sorong yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD adalah jenis pajak daerah dengan rata-rata dalam tujuh tahun terakhir sebesar 15,2% dan jenis retribusi daerah dengan rata-rata dalam tujuh tahun terakhir sebesar 14,5.

**Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2007- 2013 (Rupiah)**

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi (%)
2007	251.920.211.00	8.372.362.900.00	3,7
2008	261.278.400.00	10.258.859.262.00	2,7
2009	387.190.136.00	13.381.188.093.00	2,3
2010	359.836.889.00	16.200.176.123.00	2,6
2011	2.089.573.098.00	17.127.407.275.00	12,2
2012	2.400.679.129.00	18.456.130.263.00	13,8
2013	11.488.223.730.00	75.189.158.554.99	15,2

Sumber : Data Diolah

Menurut tabel 4.6 Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2007 kontribusinya sebesar 3,7% dan tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 2,7% dan pada tahun 2009 sebesar 2,3% kemudian pada tahun 2010 kontribusi mengalami peningkatan sebesar 2,6% dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan lagi sebesar 12,2% kemudian pada tahun 2012 sebesar 13,8% dan tahun 2013 melonjak sebesar 15,2%. Jadi dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan sehingga berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong dan kontribusinya dapat membantu dalam penyelenggaraan pembangunan serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Tabel 4.7 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 20097- 2013 (Rupiah)**

Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi (%)
2007	3.154.574.453.00	8.372.362.900.00	37,3
2008	3.705.685.930.00	10.258.859.262.00	36,3
2009	5.513.032.280.00	13.381.188.093.00	41,6
2010	5.623.823.770.00	16.200.176.123.00	34,4
2011	6.479.312.780.00	17.127.407.275.00	37,3
2012	6.397.266.321.00	18.456.130.263.00	34,8
2013	10.665.252.472.00	75.189.158.554.99	14,5

Sumber : Data Diolah

Menurut tabel 4.7 Pada tahun 2007 kontribusinya sebesar 37,3% kemudian tahun 2008 kontribusi mengalami penurunan sebesar 36,3% dan pada tahun 2009 kontribusi mengalami peningkatan sebesar 41,6% dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 34,4% dan tahun 2011 kontribusi mengalami peningkatan sebesar 37,3%. Kemudian pada tahun 2012 kontribusi mengalami penurunan sebesar 34,8% dan pada tahun 2013 kontribusi mengalami penurunan lagi sebesar 14,5%. Jadi dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi daerah tiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini bukan dikarenakan semakin rendah perolehan Retribusi Daerah akan tetapi terjadi karena penerimaan PAD terjadi peningkatan yang besar terutama dari sektor penerimaan Pajak Daerah.

Pertumbuhan dan Trend Pajak daerah

Pertumbuhan Pajak Daerah menunjukkan perkembangan penerimaan Pajak Daerah dari tahun ketahun. Pada tabel 4.9 menunjukkan perkembangan pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sorong tahun 2007-2013. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 481 persen dan pertumbuhan terendah pada tahun 2010 terjadi pertumbuhan yang minus yaitu sebesar -7 persen, akan tetapi secara keseluruhan Pajak Daerah terjadi kenaikan secara nominalnya yang sangat besar yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2013. Dan penerimaan Pajak Daerah secara signifikan dimana pada tahun 2007 hanya sebesar dua ratusan jutaan rupiah dan pada tahun 2013 menjadi sebesar sebelas miliaran rupiah.

**Tabel 4.9 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sorong
Tahun 2007-2013**

Tahun	Pajak Daerah	g Pajak Daerah (%)
2007	251920211	
2008	261278400	4
2009	387190136	48
2010	359836889	-7
2011	2089573098	481
2012	2400679129	15
2013	11488223730	379

Sumber : Data Diolah

Trend Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sorong dapat dilihat pada gambar 4.2. Pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa persamaan garis trend pajak daerah yaitu $Y = 1417 X - 3207$. Trend penerimaan Pajak Daerah terjadi trend yang positif dengan slope yang curam, hal ini menunjukkan bahwa untuk tahun-tahun kedepan penerimaan pajak daerah sangat berpotensi untuk meningkat dengan cepat. Hal ini akan memberikan kontribusinya yang besar terhadap PAD dan akan meningkatkan perolehan PAD.

Gambar 4.2 Trend Pajak Daerah Kabupaten Sorong
Tahun 2007-2013



Sumber : Data Diolah

Pertumbuhan dan Trend Retribusi Daerah

Pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sorong tahun 2007-2013 dapat dilihat pada tabel 4.10. Pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah mengalami fluktuasi yang tajam. Pada tahun 2009 terjadi pertumbuhan sebesar 49 persen kemudian turun pada tahun 2010 menjadi 2 persen dan pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan yang minus yaitu -1 persen kemudian pada tahun 2013 meningkat sangat tajam menjadi pertumbuhan yang positif sebesar 67 persen. Secara keseluruhan selang periode tahun 2007-2013 Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25 persen dan secara nominal penerimaan retribusi daerah terjadi peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2007 sebesar tiga miliaran rupiah meningkat menjadi sepuluh miliaran rupiah pada tahun 2013.

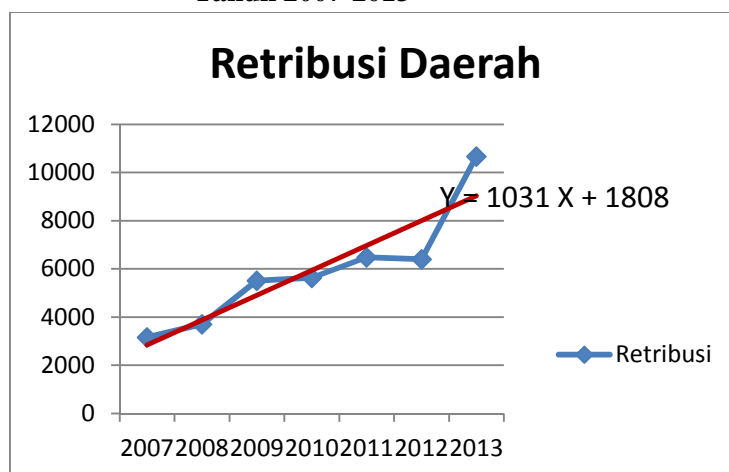
Tabel 4.10 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2007-2013

Tahun	Retribusi Daerah	g Retribusi Daerah (%)
2007	3154574453	-
2008	3705685930	17
2009	5513032280	49
2010	5623823770	2
2011	6479312780	15
2012	6397266321	-1
2013	10665252472	67

Sumber : Data Diolah

Trend Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sorong dapat dilihat pada gambar 4.3. Pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa persamaan garis trend retribusi daerah yaitu $Y = 1031 X + 1808$. Trend penerimaan retribusi Daerah terjadi trend yang positif dengan slope yang curam, hal ini menunjukkan bahwa untuk tahun-tahun kedepan penerimaan retribusi daerah sangat berpotensi untuk meningkat dengan cepat. Hal ini akan memberikan kontribusinya yang besar terhadap PAD dan akan meningkatkan perolehan PAD.

Gambar 4.2 Trend Pajak Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2007-2013



Sumber : Data Diolah

Tabel 4.10 menunjukkan perkembangan penerimaan PAD Kabupaten Sorong selang tahun 2007-2013. Penerimaan PAD secara nominal terjadi peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2007 sebesar delapan miliaran rupiah menjadi tujuh belasan miliaran rupiah pada tahun 2013. Dilihat dari pertumbuhannya penerimaan PAD mengalami fluktuasi, pada tahun 2011 terjadi pertumbuhan paling rendah hanya sebesar 6 % dan pada tahun 2013 meningkat secara tajam yaitu menjadi 307 %. Secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata penerimaan PAD Kabupaten Sorong sebesar 66 %.

**Tabel 4.11 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong
Tahun 2007-2013**

TAHUN	PAD	g PAD (%)
2007	8372362900	
2008	10258859262	23
2009	13381188093	30
2010	16200176123	21
2011	17127407275	6
2012	18456130263	8
2013	75189158555	307

Sumber : Data Diolah

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak daerah kabupaten Sorong begitu relatif kecil terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sorong, akan tetapi menunjukkan peningkatan secara signifikan.
2. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sorong lebih besar dari PAD, akan tetapi mulai mengalami penurunan.
3. Perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan trend positif dengan slopeya curam yang berarti penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tahun-tahun ke depan sangat berpotensi untuk meningkat dengan cepat.
4. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun terutama pada tahun terakhir dan berpotensi untuk meningkat dengan cepat.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa potensi pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan lagi, antara lain dengan mencari objek-objek pajak dan retribusi.
2. Upaya Pemerintah dalam peningkatan dan pembinaan terhadap para wajib pajak supaya lebih baik dalam pelayanan semaksimal mungkin terhadap wajib pajak anantara lain dengan mengadakan peraturan-peraturan yang berkesinambungan terhadap para wajib pajak. Dan kiranya kepada pemerintah Daerah kabupaten Sorong dalam hal ini pihak Dispenda perlu memberikan penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Agar bagi Wajib Pajak hendaknya terbuka dalam melaporkan pendapatan per bulann sehingga tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutangnya, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan.
3. Kepada peneliti berikutnya kiranya dapat menjadi pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti Widyaningsih. 2011, *Hukum Pajak Daerah Perpajakan*. Bandung
- Badan Pusat Statistik, “ *Kabupaten Sorong Dalam Angka* “, diterbitkan oleh BPS Kabupaten Sorong tahun 2007-2013.
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong “diterbitan oleh Dispenda Kabupaten Sorong tahun 2007-2013.
- Hakki, D. 2008. *Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Pada Masa Otonomi Daerah di Kota Bogor* [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Karianga Hendra, S.H.,M.H.,2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal)*,Manado
- Mardiasmo.2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Andi, Yogyakarta.
- Moeleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda
- Papalangi Emod, 2006. *Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Toraja*[skripsi].
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Rosdiana, H., dan R. Tarigan. 2005. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siahaan Marihot Pahala.2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta
- Siagian, Sondang P,. 2008. *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sidic Macfud, 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Keuangan Daerah Kota Malang* [skripsi].
- Sinaga, B. M. dan H. Siregar. 2005. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sugiyono .2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetak keenam. Penerbit Alfabeta, Bandung.